

RENCANA KERJA TAHUN 2024



**BADAN/DINAS
KABUPATEN GORONTALO**



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO
NOMOR : 701 /06/XII/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL KABUPATEN GORONTALO

BUPATI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 125 huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Persiapan Penyusunan Rencana Kerja meliputi Penyusunan Rancangan keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim penyusun Renja Perangkat Daerah;

b. bahwa untuk lancarnya penyusunan rancangan awal Rencana Kerja sebagaimana pada huruf a, maka perlu dibentuk tim yang bertugas untuk itu;

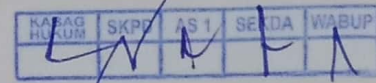
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

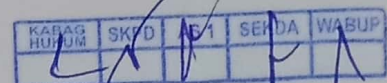
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2021 Nomor 3);

Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Perangkat Daerah dalam Melaksanakan Tugas Teknis Sehari-hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3, Seri E), sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 26 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 26);



2. Telaahan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Nomor 800/DINSOS/461/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 Perihal Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo TAHUN 2024;

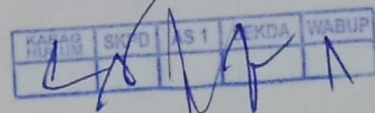
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. menyusun Dokumen Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Tahun 2024 yang meliputi Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir Renja;
- b. menyusun Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Tahun 2023 yang meliputi Rancangan Perubahan Renja dan Rancangan Akhir Perubahan Renja;
- c. menyiapkan bahan dan data penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- d. melakukan Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan capaian sasaran rencana strategis sampai dengan tahun berjalan;
- e. menyusun Program dan Kegiatan dengan berpedoman pada Renstra;
- f. mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengelola data sekunder yang diperlukan untuk menyusun Rencana Kerja;
- g. membuat kesimpulan tentang faktor keberhasilan suatu organisasi dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang; dan
- h. merumuskan tantangan, ancaman dan kekuatan serta peluang keberhasilan pelaksanaan tugas SKPD.



KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal



BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo.
2. Inspektur Kabupaten Gorontalo.
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk perlunya.
5. Arsip.

SIGN H

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO

NOMOR :

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN
GORONTALO

**NAMA-NAMA TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL
KABUPATEN GORONTALO**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN GORONTALO	KETUA	
2	SEKERTARIS DINAS SOSIAL KABUPATEN GORONTALO	SEKRETARIS	
3	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	ANGGOTA	
4	KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL	ANGGOTA	
5	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL	ANGGOTA	
6	KEPALA BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN	ANGGOTA	
7	PERENCANA AHLI MUDA	ANGGOTA	
8	ANALISIS KEUANGAN PUSAT/DAERAH AHLI MUDA	ANGGOTA	
8	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN ..	ANGGOTA	

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

SIGN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan ridhonya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo tahun 2024 dapat disusun dengan baik dan lancar. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo tahun 2024 merupakan rencana kerja yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial selama 1 (satu) Tahun ke depan.

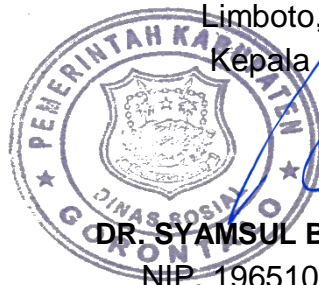
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Dinas Sosial merupakan keharusan dalam rangka menetapkan Program dan Kegiatan 1(satu) tahunan sesuai dengan Visi Misi Kepala Daerah yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD dengan menyelaraskan Usulan/Aspirasi Masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2023.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini adalah untuk mensinkronisasikan antara kebutuhan masyarakat dengan Program Kegiatan sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah & Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Kabupaten Gorontalo Tahun 2024 yang telah ditetapkan. Penyusunan Rencana Kerja ini juga bertujuan untuk mewujudkan Pembangunan Kesejahteraan Sosial masyarakat yang Terencana, Terarah, Terintegrasi dan Berkesinambungan dari setiap Program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo pada setiap Tahun Anggaran.

Besar harapan kami, Rencana Kerja (RENJA) ini dapat digunakan sebagai Bahan Pertimbangan untuk memberikan umpan balik dan dasar dalam Pengambilan Kebijakan guna mengurangi Kesenjangan Pelayanan di Bidang Sosial.

Kami sadar bahwa dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini masih banyak terdapat kekurangan sehingga kami sangat memerlukan saran, kritik maupun masukan dari semua pihak sebagai bahan untuk penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo pada Tahun-tahun berikutnya.

Limboto, Juli 2023
Kepala Dinas Sosial



DR. SYAMSUL BAHARUDDIN, ST.ME
NIP. 19651027 199010 1 00

DAFTAR ISI

	Hal
SK- Tim Penyusun Rencana Kerja	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Sistematika Penulisan	3
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu	4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	5
2.2 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	29
2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	32
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	37
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	39
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	39
3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD	39
3.3 Telaah Rumusan Program dan Kegiatan	43
Bab IV Rencana Kerjasama Pendanaan Perangkat Daerah	50
4.1 Rencana Kerjasama Pendanaan	50
Bab V P e n u t u p	55

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional, hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang aktual dan berhasil guna sejalan dengan pembangunan di bidang lainnya. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Untuk Periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Dinas Sosial mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

- a. RENJA-SKPD merupakan dokumen yang secara substansial menjabarkan Visi, Misi Kepala Daerah ke dalam Program dan Kegiatan dan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis SKPD (RENSTRA-SKPD) sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- b. RENJA merupakan acuan SKPD untuk menuangkan Program dan Kegiatan kedalam KUA - PPAS dan Perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024.
- c. RENJA-SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan Program/kegiatan SKPD untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan SKPD sebagai wujud dari kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2024.

Mengingat pentingnya Dokumen RENJA-SKPD dalam mendukung penyelenggaraan Program Pembangunan Pemerintah Daerah, maka hendaknya dari mulai awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA-SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya secara baik dan benar.

Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah sebagai salah satu SKPD teknis yang menjalankan urusan wajib pelayanan dasar bidang sosial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial mengacu kepada

Standar Pelayanan Minimal yang ada yaitu melaksanakan Pelayanan Bidang Kesejahteraan Sosial, meliputi Program :

1. Program Rehabilitasi Sosial
2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
3. Program Penanganan Bencana

I. 2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana yang diubah terakhir dengan UU No. 12 tahun 2008.
4. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 pengganti Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pengganti Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Kepmendagri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo No. 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2021-2026
13. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Gorontalo Tahun 2024

I. 3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Rencana Kerja SKPD Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Tahun 2024 ditetapkan dengan maksud:

1. Menyediakan acuan resmi dalam penetapan tahapan program dan kegiatan tahunan untuk menentukan prioritas – prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2021-2026 dapat tercapai.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan.
4. Memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Gorontalo 2021-2026

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Tahun 2024 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Tahun 2024 adalah:

1. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistematis.
2. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintah dan pembangunan.

3. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas sosial Kabupaten Gorontalo dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
6. Sebagai pedoman perencanaan kinerja SKPD selama 1 (satu) tahun kedepan (2024)serta untukmengimplementasikan program-program dalam RPJMD 2021-2026,
7. Sebagai alat untuk mengakselerasi pencapaian visi dan misi Kabupaten Gorontalo.

I. 4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja SKPD Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Tahun 2024 sebagai implementasi perencanaan Pembangunan tahunan, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU.

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berisi uraian tentang rencana penganggaran dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Laludan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo adalah penjabaran Rencana Kerja tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo sebagai Pelaksana Teknis Pembangunan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Sosial.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo pada Tahun 2022.

Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo pada Tahun 2022 yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 7.456.902.753,- dengan capain realisasi kinerja fisik sebesar 99% dan capain realisasi keuangan sebesar Rp. 7.181.166.871,- (95,60%).

Implikasi yang timbul terhadap Capaian Program Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo adalah Persentase Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sebesar 78,13 % dan Persentase korban bencana alam dan sosial yang terlayani kebutuhan dasarnya sebesar 100 %. Berikut Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial sampai dengan Tahun 2022 :

**Tabel Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Capaian Renstra SKPD
s/d Tahun 2022**

2.2. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD.

Kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial dan masih banyaknya yang belum sepenuhnya terselesaikan sejalan dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat. Untuk itu, maka penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui pembangunan kesejahteraan sosial perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan dan ditingkatkan agar apa yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan dan jangkauan pelayanan dapat diperluas. Hal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan sosial yang mengamanatkan agar pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan, serta melakukan penanggulangan kemiskinan.

Memperhatikan hal tersebut di atas, dan melihat kenyataan yang ada khususnya terkait dengan kondisi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial selama tahun 2015-2019, secara umum masih sangat jauh dari ideal. Hal tersebut tidak saja karena terbatasnya sumber daya manusia (SDM) kesejahteraan sosial, dana, sarana dan prasarana, faktor keluarga, masyarakat serta nilai-nilai sosial yang beragam dan terbatasnya ketersediaan legal formal turut memberi pengaruh terhadap capaian kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pada sisi lain permasalahan krisis ekonomi dan masih tidak menentunya keuangan global, terbatasnya kesempatan lapangan kerja dan tingginya kelompok umur produktif yang tidak terserap pasar kerja serta meningkatnya jumlah lanjut usia semakin meningkatkan jumlah PMKS baik kualitatif maupun kuantitatif. Kondisi tersebut di atas apabila tidak disikapi dengan cepat, tepat, utuh dan menyeluruh akan menjadi beban bagi pemerintah dan masyarakat.

- a. Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis terkait dengan pelayanan SKPD.

Pada pembahasan sebelumnya diungkapkan bahwa tingkat kinerja pelayanan SKPD terhadap indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini terkait dengan permasalahan klasik yang dihadapi oleh SKPD yakni alokasi anggaran untuk intervensi kegiatan-kegiatan peningkatan kesejahteraan sosial sangatlah terbatas dibandingkan dengan jumlah dan persebaran penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ada.

Hal kritis terkait dengan tingkat kinerja pelayanan SKPD adalah :

1. Terbatasnya alokasi anggaran untuk intervensi kegiatan upaya peningkatan kesejahteraan sosial.
2. Intervensi kegiatan untuk peningkatan kesejahteraan sosial memerlukan waktu yang relatif lama, tidak seperti membangun sebuah gedung, sehingga kurang menjadi prioritas dari sebuah pembangunan itu sendiri.

3. Peran pemerintah masih sangat dominan dalam pelayanan pemberdayaan PMKS, sehingga mengurangi substansi dari pemberdayaan sosial itu sendiri.
4. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Ada sejumlah permasalahan mendasar yang dihadapi antara lain:

- (i) cakupan atau jangkauan pelayanan program kesejahteraan sosial yang dibagi ke dalam empat pilar intervensi masih sangat terbatas,
- (ii) kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS masih tumpang tindih satu sama lain,
- (iii) keterbatasan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran,
- (iv) peran pemerintah yang masih dominan dalam pelayanan program pemberdayaan PMKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu sendiri,
- (v) kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih 2 terbatas, dan
- (vi) koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal.

Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, capaian program nasional/internasional.

1. Lambatnya pencapaian target kinerja karena program dan kegiatan yang diharapkan dapat dilaksanakan tidak didukung dengan alokasi anggaran yang memadai.
 2. Permasalahan kesejahteraan sosial akan lebih sulit dituntaskan terkait dengan political concern. Dimana penyandang masalah masalah kesejahteraan sosial terutama kecacatan dan keterlantaran belum menjadi fokus perhatian pembangunan.
 3. Sulitnya memberdayakan kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial, karena peran pemerintah masih sangat dominan sementara program nasional juga enggan meluncurkan anggaran bagi daerah.
- b. Tantangan dan peluang dan meningkatkan pelayanan SKPD

Tantangan yang dihadapi oleh SKPD dalam pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Gorontalo antara lain :

1. Masih banyaknya penderita masalah kesejahteraan sosial (PMKS) khususnya Fakir Miskin.
2. Masih banyaknya PMKS yang belum mendapatkan bantuan sosial dan perlindungan sosial.
3. Cakupan luas wilayah Kabupaten Gorontalo menyulitkan dalam identifikasi dan monitoring evaluasi PMKS.
4. Wilayah Kabupaten Gorontalo merupakan wilayah rawan bencana terutama rawan banjir dengan sebaran lebih dari 50% dari jumlah kecamatan.

5. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.
6. Belum stabilnya ekonomi nasional yang berdampak pada peningkatan jumlah PMKS.

Adapun peluang dalam mengembangkan pelayanan kesejahteraan sosial adalah :

- 1) Adanya komitmen yang kuat Bupati Gorontalo terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat yang tertuang dalam visi Kabupaten Gorontalo “ Kabupaten Gorontalo Sehat, Cerdas, Kreatif dan berwawasan Lingkungan Menuju Masyarakat Sejahtera dan Mandiri “
 - 2) Pemberlakuan otonomi secara penuh kepada daerah.
 - 3) Pola Corporate Social Responsibility (CSR) bagi BUMN dan sektor swasta lainnya sebagai wujud tanggung jawab dan kepedulian sosial masyarakat.
 - 4) Potensi tumbuhnya kepedulian pelaku usaha kesejahteraan sosial yang berbasis masyarakat.
- c. Formulasi isu-isu penting untuk rekomendasi dan catatan strategis tindak lanjut dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Dari 7 (tujuh) isu strategis yakni : kefakirmiskinan, kecacatan, keterlantaran, ketunaan sosial, korban bencana dan tindak kekerasan, keterpencilan, kepahlawanan yang ingin dicapai belum sepenuhnya dapat terwujud, karena berdasarkan hasil evaluasi selama pelaksanaan program/kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo, terdapat beberapa permasalahan dan hambatan yang menyebabkan belum optimalnya pencapaian sasaran program secara keseluruhan, yaitu:

1. Perlunya dukungan anggaran yang memadai untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi 26 jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Belum adanya pembaharuan data PMKS setiap tahunnya.
3. Jumlah PMKS yang cukup banyak serta jangkauan wilayah yang cukup luas menyebabkan belum semua PMKS memperoleh sentuhan program/kegiatan.
4. Pentingnya peran aktif masyarakat dan dunia usaha terhadap usaha kesejahteraan sosial.
5. Perbaikan sistem informasi dalam rangka keakuratan data base PMKS dalam mendukung sistem perencanaan dan upaya mitigasi bencana.
6. Wilayah Kabupaten Gorontalo sebagian besar merupakan daerah rawan bencana khususnya bencana banjir.

2.4. Review terhadap rancangan RKPD

Pada rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2021, program dan kegiatan untuk intervensi pembangunan kesejahteraan sosial ditentukan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai pengganti Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan peraturan

pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Review terhadap rancangan RKPD Tahun 2024 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indicator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan. Pada tahun anggaran 2024 review rancangan RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai berikut:

TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

2.4. Penelaahan usulan program dan kegiatan

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang (bila sudah dilakukan)

Dalam musrenbang tingkat desa pemangku-pemangku kepentingan seperti LSM,LMD, Tokoh masyarakat, agama, pemuda secara aktif memberikan masukan serta usulan kebutuhan program/kegiatan untuk pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat desa. Demikian juga ditingkat kecamatan, kabupaten serta provinsi. Karena dalam pelaksanaan musrenbang di Gorontalo selalu menghadirkan pemangku-pemangku kepentingan yang ada.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD;

Dalam kaidah perencanaan pembangunan, penyusunan perencanaan tidak saja didasarkan pada mekanisme top down, akan tetapi juga melalui mekanisme bottom up. Proses perencanaan melalui mekanisme bottom up dilaksanakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) pada tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi sampai pada tingkat nasional. Mekanisme ini didasarkan pada undang-undang perencanaan pembangunan yang ada.

Proses perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari proses perencanaan pembangunan daerah, yang disusun berdasarkan mekanisme bottom up melalui musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan, forum SKPD serta musrenbang tingkat kabupaten dan provinsi juga musrenbang tingkat nasional.

Pada Rencana Kerja (Renja) 2024 ini memuat hasil pelaksanaan musrenbang tingkat desa, Kecamatan dan Kabupaten yang telah dilaksanakan pada bulan Februari Tahun 2021, serta telah dibahas dalam forum SKPD yang dilaksanakan pada bulan Maret 2021 serta telah dibahas dalam Musrenbang Kabupaten yang akan dilaksanakan pada bulan Maret 2021.

Selain memuat hasil musyawarah, rancangan awal Renja 2024 juga memuat usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan, namun tidak ada usulan terkait Tupoksi OPD Dinas Sosial, sebagaimana tabel 2.5 di bawah ini.

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para
Pemangku Kepentingan Kabupaten Gorontalo
Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Arah dan kebijakan serta strategi pembangunan kesejahteraan sosial nasional adalah sebagai berikut :

(1) Rehabilitasi Sosial,

Dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, dilaksanakan secara persuasif, motivatif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.

(2) Jaminan sosial,

Adalah jaminan sosial yang diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan dan tunjangan berkelanjutan untuk :

- (a) menjamin fakir miskin, anak yatim piatu telantar, lanjut usia telantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
- (b) menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.

(3) Pemberdayaan sosial dimaksud untuk:

- (a) memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
- (b) meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pemberdayaan sosial dilakukan melalui: peningkatan kemauan dan kemampuan; penggalan potensi dan sumber daya; penggalan nilai-nilai dasar; pemberian akses; dan/atau pemberian bantuan usaha.

(4) Perlindungan sosial,

Dimaksudkan untuk mencegah dan menanganisirisiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Pemerintah menyadari pentingnya pembangunan di bidang kesejahteraan sosial untuk mengupayakan agar berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaansosial, penyimpangan perilaku, ketertinggalan/ keterpencilan, serta korban bencana dan akibat tindak kekerasan dapat ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan.

Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial. Upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial tersebut, dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM bangsa Indonesia, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, pembangunan kesejahteraan sosial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kecenderungan primordialisme dan eksklusivisme yang mengancam tatanan hidup bangsa Indonesia. Bila hal ini kita abaikan maka akan mengarah pada terjadinya friksi dan konflik horizontal, sehingga pada gilirannya dapat menimbulkan disintegrasi sosial yang menurunkan harkat dan martabat bangsa.

Perkembangan pembangunan kesejahteraan sosial saat ini diwarnai oleh adanya perubahan paradigma pembangunan nasional, yang bergeser dari sentralistik ke arah desentralistik. Hal ini merupakan penjabaran dari kebijakan pemerintah untuk memberikan peran dan posisi yang lebih besar kepada masyarakat sebagai pelaku dan pelaksana utama pembangunan.

Melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah, khususnya daerah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Kenyataan menunjukkan bahwa pemberian otonomi tersebut tidak sepenuhnya berjalan mulus, karena masih sering ditemukan adanya eksese negatif yang mengakibatkan terjadinya hambatan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Perubahan ini hendaknya disikapi secara arif, bijaksana, dan diarahkan pada terwujudnya pemahaman dan komitmen pelaku pembangunan kesejahteraan sosial di setiap daerah kabupaten dan kota.

Tujuan dan sasaran jangka menengah (2021-2026) dalam penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo adalah : **“Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan” dengan sasaran utama adalah : “Penurunan Angka Kemiskinan”**

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran SKPD sebagaimana tabel 3.1 sebagai berikut :

TABEL 3.1
KETERKAITAN TUJUAN, SASARAN DAN TARGET

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
			1	2	3	4	5
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	Penurunan Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan (%)	17 - 15	14,99 - 14	13,99 - 13	12,99 - 12	< 12
	(1) Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial untuk mencegah dan menangani kemiskinan dan kebencanaan	(1) Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	0,17	0,26	0,35	0,45	0,55
		(2) Persentase PMKS yang tertangani	98,50	98,70	98,90	99,00	99,30
		(3) Persentase PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	98,67	98,96	99,25	99,45	99,85
		(4) Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100	100	100
		(5) Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100	100	100	100	100
	(2) Meningkatkan fungsi sosial bagi penyandang disfungsi sosial secara wajar dalam kehidupan masyarakat	(1) Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	100	100	100	100	100
		(2) Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100	100	100	100	100
		(3) Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	97,90	98,10	98,30	98,60	99,00

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
			1	2	3	4	5
	(3) Meningkatnya pemberdayaan sosial yang partisipatif dalam penyelenggaraan layanan rujukan terpadu kesejahteraan sosial	(1) Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00
	(4) Meningkatnya penyelenggaraan standar pelayanan minimal (SPM) bidang sosial	(1) Persentase penyandang disabilitas terlantar di luar panti terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	100	100	100	100
		(2) Persentase anak terlantar di luar panti terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	100	100	100	100
		(3) Persentase lanjut usia terlantar di luar panti terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	100	100	100	100
		(4) Persentase gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	100	100	100	100
		(5) Persentasi korban bencana menerima pemenuhan kebutuhan dasarnya selama masa tanggap darurat	100	100	100	100	100

3.3 Telaah Rumusan Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

a. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Memasuki tahap baru pemerintahan Kabupaten Gorontalo dan RPJMD 2021 – 2026, visi dan misi Kepala Daerah tentunya bermuara pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Terdapat beberapa permasalahan maupun tantangan dalam mewujudkan hal ini, antara lain masih adanya pengangguran dan masyarakat miskin, tingkat pendapatan yang masih tergolong rendah sehingga berakibat pada rendahnya daya beli masyarakat, fasilitas infrastruktur yang masih belum memadai dan masih rendahnya kontribusi dunia usaha terhadap peningkatan/pertumbuhan perekonomian daerah. Kemiskinan sebagai salah satu tantangan dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera merupakan gambaran suatu kondisi masyarakat yang serba tidak berkecukupan menyangkut berbagai hal pemenuhan kebutuhan hidup.

b. Pengentasan kemiskinan

Arah kebijakan umum untuk memantapkan pembangunan ekonomi, kesejahteraan dan kemandirian tercermin dari peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, antara lain dengan menurunannya angka pengangguran terbuka, meningkatnya pertumbuhan ekonomi serta penurunan angka kemiskinan.

c. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah.

Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan pembangunan sosial, budaya dan ekonomi. Melalui pemberdayaan ini masyarakat diarahkan untuk mengoptimalkan kemampuan baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang dimiliki. Komitmen untuk pemberdayaan masyarakat ini akan didukung sepenuhnya oleh alokasi anggaran pembangunan yang berpihak pada masyarakat.

d. Pengembangan daerah terisolir

Terdapat komunitas adat terpencil (KAT) di wilayah Kabupaten Gorontalo diantaranya Desa Buhu Kecamatan Tibawa, Desa Pilomonu Kecamatan Mootilango, Desa Bululi Kecamatan Asparaga dan Desa Pangea Kecamatan Tolangohula.

TABEL 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Tahun 2024

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Program dan kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo ditujukan untuk dapat mewujudkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial. Upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial tersebut, dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM bangsa Indonesia, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri.

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 4.271.865240,-
2. Program Pemberdayaan Sosial dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.120.000.000,-
3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan total alokasi anggaran sebesar Rp.10.080.000,-
4. Program Rehabilitasi Sosial dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.416.482.190,-
5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.744.200.000,-
6. Program Penanganan Bencana dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.362.898.950,-
7. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.15.000.000,-

Untuk dapat menunjang keberhasilan dari pelaksanaan program-program tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo untuk merencanakan beberapa Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana Tabel 4.2 sebagai berikut :

TABEL 4.2
TABEL RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

Demikian rancangan awal Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo serta rencana pendanaan Tahun 2024, sebagai dasar awal penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2024 serta sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat termasuk dunia usaha dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan, pembangunan dan pemerintahan.


BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo merupakan penjabaran tugas pokok dan fungsi SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya dalam pelayanan umum dan pembangunan yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD tahun 2021-2026.

Pada prinsipnya Rencana Kerja (Renja) SKPD 2024 ini akan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai tujuan dan sasaran yang diinginkan apabila mendapat dukungan dan keikutsertaan seluruh pihak, baik aparatur maupun masyarakat secara aktif serta fasilitas sarana dan prasarana secara optimal. Peran seluruh stakeholder dalam program dan kegiatan akan memberikan indikator capaian kegiatan pelayanan umum dan pembangunan yang maksimal.

Demikian Rencana Kerja 2024 SKPD Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo disusun sebagai dasar untuk melaksanakan program kesejahteraan sosial di Kabupaten Gorontalo. Semoga Allah SWT memberikan bimbingan dan dan melimpahkan ridho-Nya sehingga program kesejahteraan sosial di Kabupaten Gorontalo tahun 2024 dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Limboto, Juli 2023
Kepala Dinas Sosial



Dr. SYAMSUL BAHARUDDIN, ST,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680716 199303 1 005

TABEL T-C 29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022
KABUPATEN GORONTALO

NAMA SKPD : DINAS SOSIAL

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Capaian Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) / Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) / 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-1) / 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun (n-2) / 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) / 2022	Tingkat Realisasi SKPD Tahun (n-2) 2022 (%)		Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (n-1) / 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 06 01 01	I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN menerima gaji dan tunjangan	100 %	41.7 %	100 %	194.15 0	194.1	96 %	96 %	100
1 06 01 01 01	1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	72 Laporan	100 %	25 %	0 0	0.0	0 0	0 0	0
1 06 01 01 02	2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72 Laporan	100 %	25 %	0 0	0.0	0 0	0 0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1 06 01 01 06	2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN menerima gaji dan tunjangan	2088 orang/b	100.0 %	29 Orang	29	0	100.0	348 Orang	126 orang	36.207
1 06 01 01 07	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	72 Dokumen	100.0 %	12 Bulan	12	Bulan	100.0	12 Dokumen	12 Bulan	100
1 06 01 01 08	4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	102 Laporan	0.0 %	0 -	0	0	0.0	0 0	0 0	0 0
1 06 01 01 9	5 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	0.0 %	0 -	0	0	0.0	0 0	0 0	0 0
1 06 01 01 10	6 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	0.0 %	0 -	0	0	0.0	0 0	0 0	0 0
1 06 01 01 11	7 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6 Dokumen	0.0 %	0 -	0	0	0.0	0 0	0 0	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 06 01 01 12 8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	0.0 %	0 -	0 0	0.0	0 0	0 0	0
1 06 01 01 13 9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor diadakan	6 Paket	0.0 %	0 set	0 0	0.0	1 Pket	100 Paket	10000
1 06 01 01 14 10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor diadakan	5 Paket	0.0 %	0 -	0 0	0.0	1 Pket	0 0	0
1 06 01 01 15 11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket ATK dan alat pembersih diadakan	6 Paket	100.0 %	2 Paket	2 Paket	100.0	1 Paket	101 Paket	10100
1 06 01 01 16 12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan diadakan	6 Paket	100.0 %	2 Jenis	2 jenis	100.0	2 Paket	101 Jenis	5050
1 06 01 01 17 13	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yg mendapat fasilitasi	72 Laporan	0.0 -	0 -	0 0	0.0	12 Laporan	0 0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 06 01 01 18 14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	100.0 %	1 Tahun	1 Tahun	100.0	12 Laporan	106 Laporan	883.33
1 06 01 01 19 15	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	0.0 -	0 -	0 0	0.0	0 0	0 0	0
1 06 01 01 20 16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0.0 -	0 -	0 0	0.0	0 0	0 0	0
1 06 01 01 21 17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0.0 -	0 -	0 0	0.0	0 0	0 0	0
1 06 01 01 22 18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat kabar berlangganan	72 Laporan	0.0 -	2 Jenis	2 Jenis	100.0	12 Laporan	2 Jenis	16.667
1 06 01 01 13 10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan langganan internet dan listrik	72 Laporan	100.0 %	12 bulan	12 Bulan	100.0	12 Lporan	106 Laporan	883.33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1 06 01 01 17	11 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Unit	100.0 %	5 Unit	0	0	0.0	12	Laporan	0	0	0
1 06 01 01 18	12 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	100.0 %	1 Unit	1	Unit	100.0	1	Unit	1	Unit	100
1 06 01 01 19	13 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan terawat / terpelihara	13 Unit	0.0 %	2 Unit	2	Unit	100.0	2	Unit	2	Unit	100
1 06 01 01 20	14 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung mendapat pemeliharaan	15 Unit	0.0 %	3 Gedung	3	Gedung	100.0	3	Unit	3	Gedung	100
1 06 01 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan	100 %	22.9 %	100 %	#DIV/0!	%	#DIV/0!	100 %	%	100 %	%	100
1 06 01 02 01	1 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	730 KK	100.0 %	30 KK	30	KK	100.0	50	KK	101	KK	202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 06 01 02 02	2 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	730 KK	0.0 %	0 -	0 %	0.0	100 KK	0 0	0
1 06 01 02 03	3 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	205 Orang	0.0 %	0 -	0 %	0.0		3 Orang	0
1 06 01 02 04	4 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	19 Orang	0.0 %	100 KK	100 KK	0.0	19 Orang	100 Orang	526.32
1 06 01 03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase korban tindak kekerasan warga migran tertangani	100 %	15.7 %	100 %	#DIV/0! %	#DIV/0!	100 %	100 %	100
1 06 01 02 01	1 Pasmitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan	Jumlah korban tindak kekerasan warga migran mendapat bantuan sosial	25 orang	0.0 %	5 orang	5 Orang	100.0	5 Orang	5 Orang	100
1 06 01 02	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100 %	21.3 %	100 %	#DIV/0! %	#DIV/0!	100 %	100 %	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1 06 01 02 01	1 Penyediaan Perumahan	Jumlah penyandang disabilitas, lanjut usia dan anak terlantar mendapat bantuan Jaminan hidup	1020 orang	0.0 %	200 orang	1313	Orang	656.5	110	Orang	0	0	0
1 06 01 02 02	2 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Lansia dan penyandang disabilitas mendapat bantuan alat bantu (Kursi Roda) Jumlah Lansia dan penyandang disabilitas	145 orang	0.0 %	15 orang	15	%	100.0	15	Orang	0	0	0
1 06 01 02 03	3 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	100.0 %	100 orang	0	0	0.0	100	Orang	0	0	0
1 06 01 02 04	4 Pemberian bimbingan sosial kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100 orang	44.4 %	100 orang	100	%	100.0	100	Orang	0	0	0
1 06 01 02 05	5 Penyediaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota	60 orang	0.0 %	0 -	0	0	0.0	0	0	0	0	0
1 06 01 02 06	6 Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota	60 orang	0.0 -	0 -	0	0	0.0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1 06 01 02 07	7 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	60 orang	0.0 -	0 -	0	0	0.0	0 0	0 0	0
1 06 01 02 08	8 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/ Kota	60 orang	0.0 -	0 -	0	0	0.0	0 0	0 0	0
1 06 01 02	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100 %	23.1 %	100 %	#DIV/0!	%	#DIV/0!	100 %	100 %	100
1 06 01 02 1	1 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar (teknik sprague multiflyer)	Jumlah anak terlantar yang terdata	432 Orang	0.0 %	432 Orang	40	Orang	9.3	435 Orang	0 0	0
1 06 01 02 2	2 Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang mendapat rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota	45 Orang	0.0 %	0 0	0	%	0.0	0 0	0 0	0
1 06 01 02 3	3 Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang dapat dipantau Kewenangan Kabupaten/ Kota	0 -	0.0 %	0 -	0	0	0.0	0 0	0 0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1 06 01 02 4	4 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pemutahiran DTKS	250000 Orang	100.0 %	0 -	0	0	0.0	0 0	0 0	0
1 06 01 02 5	5 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa /kelurahan yang melaksanakan pengelolaan data SIKs-NG secara Android	474 Orang	100.0 %	205 Desa/ Kel	205	0	100.0	10000 Keluarga	305 Orang	3.05
1 06 01 02 6	6 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah keluarga fakir miskin mendapat stimulan KUBE Penumbuhan Jumlah keluarga fakir miskin menerima bantuan UEP-ekonomi kreatif	1470 Orang	0.0 %	100 KK	230	KK	230.0	160 Keluarga	0 0	0
1 06 01 03	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase keluarga korban bencana mendapat bantuan sosial	100 %	0.0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100
1 06 01 03 01	1 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/ Kota	13334 Orang	100.0 %	1667 Paket	300	Paket	18.0	3000 Orang	0 0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1 06 01 03 2	2 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	900 Orang	0.0 %	0 -	0	0	0.0	100 Orang	0 0	0
1 06 01 03 3	3 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	205 Kampung	0.0 %	0 -	0	0	0.0	10 Kampung	0 0	0
1 06 01 03 4	4 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Pengerahan Tagana ke Titik Lokasi Bencana Rakor Tagana Tingkat Kabupaten	1000 Orang	0.0 %	2 Kali	4	Kali	200.0	3 Kampung	1 Kampung	33.333

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 06 01 03	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase keluarga korban bencana mendapat bantuan sosial	100 %	0.0 %	0 %	0 %		100 %	100 %	100
1 06 01 03 01	1 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP mendapat biaya operasional Kegiatan tali asih veteran dan warakawuri pada Hari Pahlawan	5 TMP	0.0 %	0 -	0	0	0.0	1 TMP	0 0 0

TABEL T-C 30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL
KABUPATEN GORONTALO PROVINSI GORONTALO

NO	INDIKATOR SASARAN	SPM/ Standar Nasional	Indikator Kinerja Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				TAHUN (n-2) / 2022	TAHUN (n-1) / 2023	TAHUN (n) / 2024	TAHUN (n+1) / 2025	TAHUN (n-2) / 2022	TAHUN (n-1) / 2023	TAHUN (n) / 2024	TAHUN (n+1) / 2025	
1	2	3	4	9				9				13
1	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial		Persentase	55%	60%	65%	70%	45%	-	65%	70%	
2	Persentase korban tindak kekerasan warga migran tertangani		Persentase	100%	100%	100%	100%	40%	-	100%	100%	
3	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial		Persentase	100%	100%	100%	100%	38%	-	100%	100%	
4	Persentase PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar		Persentase	98.67%	98.96%	99.25%	99.45%	38%	-	99.25%	99.45%	
5	Persentase keluarga korban bencana mendapat bantuan sosial mendapat bantuan sosial skala kabupaten yang aktif		Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
6	Cakupan pengelolaan Taman Makam Pahlawan		Persentase	100%	100%	100%	100%	9%	-	100%	100%	

TABEL T-C 31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2024
KABUPATEN GORONTALO

No	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Gorontalo	Pemenuhan standar pelayanan minimal bidang sosial	100%	5,153,354,293	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Gorontalo	Pemenuhan standar pelayanan minimal bidang sosial	100%	3,933,943,399	
1a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Limboto	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan OPD	100%	45,147,254	1a Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Limboto	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan OPD	100%	-	
i	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Kali	33,880,000	i Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
i	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Kali	11,267,254	i Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Limboto	Persentase ASN menerima gaji dan tunjangan secara tepat waktu	100%	3,490,588,210	1b Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Limboto	Persentase ASN menerima gaji dan tunjangan secara tepat waktu	100%	3,493,158,399	
i	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang	3,315,533,210	i Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang	3,366,598,399	
ii	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Kali	165,375,000	ii Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	126,560,000	
ii	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan		Jumlah Laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	4 Kali	9,680,000	ii Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan			
1c	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Limboto	Persentase dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang tersusun	100%	8,712,000	1c Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Limboto	Persentase dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang tersusun	100%	9,240,000	
i	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	8,712,000	i Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	9,240,000	
1d	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Limboto	Tingkat kepatuhan kehadiran ASN	100%	95,892,500	1d Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Limboto	Tingkat kepatuhan kehadiran ASN	100%	25,000,000	

I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Gorontalo	Pemenuhan standar pelayanan minimal bidang sosial	100%	5,153,354,293	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Gorontalo	Pemenuhan standar pelayanan minimal bidang sosial	100%	3,933,943,399
	i Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	55 Stel	49,912,500	i Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	25,000,000
	ii Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Kali	9,680,000	ii Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
	iii Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	36,300,000	iii Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
1e	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Limboto	Cakupan pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah secara memadai	100%	700,688,030	1e Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Limboto	Cakupan pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah secara memadai	100%	253,580,000
	i Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Set	2,420,000	i Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
	ii Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	24,200,000	ii Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
	iii Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	78,650,000	iii Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	56,262,100
	iv Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Jenis	33,880,000	iv Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	10,893,074
	v Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Tamu yg mendapat fasilitasi	850 Orang	60,500,000	v Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Tamu yg mendapat fasilitasi		
	vi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	501,038,030	vi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	186,424,826
1f	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Limboto	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tersedia	100%	450,500,000	1f Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Limboto	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tersedia	100%	-

I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Gorontalo	Pemenuhan standar pelayanan minimal bidang sosial	100%	5,153,354,293	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Gorontalo	Pemenuhan standar pelayanan minimal bidang sosial	100%	3,933,943,399
	i Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	350,000,000	i Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		
	ii Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	18,000,000	ii Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
	iii Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	82,500,000	iii Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
1c	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Limboto	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	158,510,000	1c Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Limboto	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	74,125,000
	i Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Jenis	7,260,000	i Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	6,000,000
	ii Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	145,200,000	ii Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	65,625,000
	iii Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Unit	6,050,000	iii Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	2,500,000
1d	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Limboto	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terpelihara	100%	203,316,300	1d Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Limboto	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terpelihara	100%	78,840,000

I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Gorontalo	Pemenuhan standar pelayanan minimal bidang sosial	100%	5,153,354,293	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Gorontalo	Pemenuhan standar pelayanan minimal bidang sosial	100%	3,933,943,399	
	i Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	46,161,500	i Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	38,150,000	
	ii Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	86,369,800	ii Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	35,690,000	
	iii Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Gedung	70,785,000	iii Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Gedung	5,000,000	
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kab Gorontalo	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana	55%	355,000,000	II	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kab Gorontalo	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang	55%	70,000,000
	2a Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Kab Gorontalo	Persentase warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan keluarga fakir miskin lainnya yang meningkat kualitas hidupnya	35%	200,000,000	2a	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Kab Gorontalo	Persentase warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan keluarga fakir miskin lainnya yang meningkat kualitas hidupnya	35%	25,000,000
	i Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT		Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 KK	200,000,000	i	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT		Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 KK	25,000,000
	ii Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT		Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	0	-	ii	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT		Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	0	-
	2b Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kab Gorontalo	Persentase tingkat potensi sumber kesejahteraan sosial	80%	155,000,000	2b	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kab Gorontalo	Persentase tingkat potensi sumber kesejahteraan sosial	80%	45,000,000

I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Gorontalo	Pemenuhan standar pelayanan minimal bidang sosial	100%	5,153,354,293	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Gorontalo	Pemenuhan standar pelayanan minimal bidang sosial	100%	3,933,943,399	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			i		Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	205 Orang	45,000,000	
			Jumlah Kasie Kesos dan PSM mendapat Bimbingan peningkatan kapasitas	224	25,000,000						
			Jumlah Penyelenggaraan Evaluasi Kinerja Kasie Kesos dan PSM	1 Kegiatan	25,000,000						
			Jumlah kegiatan Bimbingan sosial bagi penerima bantuan sosial dan bantuan hibah	1 Kegiatan	25,000,000						
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			ii		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			
			Jumlah Keluarga Rawan Sosial Ekonomi Daerah Perdesaan dan Perkotaan mendapat bantuan sosial	40 KK	80,000,000			Jumlah Keluarga Rawan Sosial Ekonomi Daerah Perdesaan dan Perkotaan mendapat bantuan sosial			
III	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Kab Gorontalo	Persentase korban tindak kekerasan warga migran tertangani	100%	12,100,000	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Kab Gorontalo	Persentase korban tindak kekerasan warga migran tertangani	100%	5,800,000	

I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Gorontalo	Pemenuhan standar pelayanan minimal bidang sosial	100%	5,153,354,293	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Gorontalo	Pemenuhan standar pelayanan minimal bidang sosial	100%	3,933,943,399	
3a	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kab Gorontalo	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		12,100,000	3a	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kab Gorontalo	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	-	
i	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota			i	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5,800,000
i			Jumlah korban tindak kekerasan warga migran mendapat bantuan sosial	5 Orang	12,100,000	i			Jumlah korban tindak kekerasan warga migran mendapat bantuan sosial		
IV	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kab Gorontalo	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100%	284,300,000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kab Gorontalo	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100%	135,000,000	
4a	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab Gorontalo	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial tertangani	32%	187,500,000	4a	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab Gorontalo	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial tertangani	32%	135,000,000
i	Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	112,500,000	i	Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	30,000,000

I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Gorontalo	Pemenuhan standar pelayanan minimal bidang sosial	100%	5,153,354,293	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Gorontalo	Pemenuhan standar pelayanan minimal bidang sosial	100%	3,933,943,399
	ii Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	50,000,000	ii Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	25,000,000
	ii Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	25,000,000	ii Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	30,000,000
	iii Pemberian bimbingan sosial kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan			Pemberian bimbingan sosial kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis	250 Orang	50,000,000
4a	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kab Gorontalo	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial tertangani	32%	96,800,000	4a Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab Gorontalo	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial tertangani	32%	
	i Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	36,300,000	i Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		
	ii Penyediaan Sandang		Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	12,100,000	ii Penyediaan Sandang		Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota		
	iii Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	36,300,000	Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota		
	iv Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	12,100,000	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti				

I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Gorontalo	Pemenuhan standar pelayanan minimal bidang sosial	100%	5,153,354,293	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Gorontalo	Pemenuhan standar pelayanan minimal bidang sosial	100%	3,933,943,399
V	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kab Gorontalo	Persentase PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	98.67%	358,650,000	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kab Gorontalo	Persentase PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	98.67%	20,000,000
	5a Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Kab Gorontalo	Persentase anak terlantar tertangani	5%	78,650,000	5a Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Kab Gorontalo	Persentase anak terlantar tertangani	5%	20,000,000
	i Penjangkauan Anak-Anak Terlantar (teknik sprague multiflyer)		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	432 Orang	45,980,000	i Penjangkauan Anak-Anak Terlantar (teknik sprague multiflyer)		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	432 Orang	20,000,000
	ii Rujukan Anak-Anak Terlantar		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	18,150,000	ii Rujukan Anak-Anak Terlantar		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota		
	iii Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar		Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Kali	14,520,000	iii Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar		Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota		
	5b Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab Gorontalo	Persentase Desa/Kelurahan yang mengelola DTKS	100%	280,000,000	5b Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab Gorontalo	Persentase Desa/Kelurahan yang mengelola DTKS	100%	-
	i Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata			i Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata		
	ii Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	205 Desa	260,000,000	ii Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota		

I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Gorontalo	Pemenuhan standar pelayanan minimal bidang sosial	100%	5,153,354,293	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Gorontalo	Pemenuhan standar pelayanan minimal bidang sosial	100%	3,933,943,399	
	Fasilitasi Bantuan iii Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Kegiatan	20,000,000	ii Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			
VI	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kab Gorontalo	Persentase keluarga korban bencana mendapat bantuan sosial	100%	146,000,000	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kab Gorontalo	Persentase keluarga korban bencana mendapat bantuan sosial	100%	95,000,000	
	6a Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kab Gorontalo	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	96,000,000	6a Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kab Gorontalo	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	95,000,000	
	i Penyediaan Makanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	3000 Paket	96,000,000	i Penyediaan Makanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	3000 Orang	80,000,000	
	ii Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Paket	45,000,000	ii Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	15,000,000	
	ii Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota			iii Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota			
	ii Pelayanan Dukungan Psikososial		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota			iv Pelayanan Dukungan Psikososial		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota			
	6b Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab Gorontalo	Persentase desa yang menyelenggarakan kesiapsiagaan tanggap darurat bencana	100%	50,000,000	6b Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab Gorontalo	Persentase desa yang menyelenggarakan kesiapsiagaan tanggap darurat bencana	100%	-	

I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Gorontalo	Pemenuhan standar pelayanan minimal bidang sosial	100%	5,153,354,293	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Gorontalo	Pemenuhan standar pelayanan minimal bidang sosial	100%	3,933,943,399	
	i Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	20,000,000	i Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			
	ii Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Kali	30,000,000	ii Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			
VII	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Kab Gorontalo	Cakupan pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100%	24,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Kab Gorontalo	Cakupan pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100%	-	
	7a Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional	Kec. Telaga Biru	Jumlah taman makam pahlawan tertangani	1 TMP	24,000,000	7a Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kec. Telaga Biru	Jumlah taman makam pahlawan tertangani	1 TMP	-	
	i Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 TMP	6,000,000	i Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota			
			Kegiatan tali asih veteran dan warakawuri pada Hari Pahlawan	1 Kegiatan	18,000,000			Kegiatan tali asih veteran dan warakawuri pada Hari Pahlawan			
J U M L A H					6,333,404,293						4,259,743,399

TABEL T-C 32
USULAN PROGRAM KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024
KABUPATEN GORONTALO

NAMA SKPD : DINAS SOSIAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN ANGGARAN	CATATAN
1	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Limboto	Persentasi anak terlantar tertangani		
	<u>Kegiatan</u> : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Limboto	Persentase PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar		
	<u>Sub Kegiatan</u> : Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Limboto	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Limboto	Persentase warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan keluarga fakir miskin lainnya yang meningkat kualitas hidupnya		

	<u>Kegiatan</u> : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Limboto	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial		
	<u>Sub Kegiatan</u> : Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Limboto	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		

Tabel T-C 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode	Program/Kegiatan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu
3	4	5							
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemenuhan standar pelayanan minimal bidang sosial	Kab Gorontalo	100%	3,933,943,399	DAU		100%	5,375,813,692
X XX 01 2 01	1a Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan OPD		100%	-			100%	50,097,781
X XX 01 2 01 01	i Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			-			4 Kali	37,268,000
X XX 01 2 01 02	ii Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-			4 Kali	12,829,781
X XX 01 2 02	1b Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN menerima gaji dan tunjangan secara tepat waktu	Kec. Limboto	100%	3,493,158,399			100%	3,839,647,031
X XX 01 2 02 01	i Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		29 Orang	3,366,598,399			29 Orang	3,647,086,531
X XX 01 2 02 03	ii Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Bulan	126,560,000			12 Kali	181,912,500
X XX 01 2 02 07	iii Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan			-			4 Kali	10,648,000

X	XX	01	2	01	01	i	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								4 Kali	37,268,000	
X	XX	01	2	03		1c	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang tersusun			100%		9,240,000				100%	9,583,200
X	XX	01	2	03	06	i	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			12 Laporan		9,240,000				12 Laporan	9,583,200
X	XX	01	2	05		1d	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat kepatuhan kehadiran ASN			100%		25,000,000				100%	105,481,750
X	XX	01	2	05	01	i	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			3 Paket		25,000,000				55 Stel	54,903,750
X	XX	01	2	05	05	ii	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					-				4 Kali	10,648,000
X	XX	01	2	05	09	iii	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					-				3 Orang	39,930,000
X	XX	01	2	06		1e	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah secara memadai	Kec. Limboto		100%		253,580,000				100%	972,995,000
X	XX	01	2	06	01	i	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					-				2 Set	2,662,000
X	XX	01	2	06	02	ii	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					-				3 Paket	30,000,000

X	XX	01	2	01	01	i	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			-			4 Kali	37,268,000
X	XX	01	2	06	04	iii	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2 Paket	56,262,100			2 Paket	86,515,000
X	XX	01	2	06	05	iv	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	10,893,074			2 Jenis	37,268,000
X	XX	01	2	06	08	v	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yg mendapat fasilitas			-			850 Orang	66,550,000
X	XX	01	2	06	09	vi	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Tahun	186,424,826			1 Tahun	750,000,000
X	XX	01	2	07		1f	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tersedia		100%	-			100%	-
X	XX	01	2	07	01	i	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			-				
X	XX	01	2	07	06	ii	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			-				
X	XX	01	2	07	11	iii	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			-				
X	XX	01	2	08		1g	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	74,125,000			100%	174,361,000

X	XX	01	2	01	01	i	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			-			4 Kali	37,268,000
X	XX	01	2	08	01	i	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2 Laporan	6,000,000			2 Jenis	7,986,000
X	XX	01	2	08	02	ii	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	65,625,000			12 Bulan	159,720,000
X	XX	01	2	08	03	iii	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5 Unit	2,500,000			5 Unit	6,655,000
X	XX	01	2	09		1h	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terpelihara		100%	78,840,000			100%	223,647,930
X	XX	01	2	09	01	i	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit	38,150,000			1 Unit	50,777,650
X	XX	01	2	09	02	ii	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		3 Unit	35,690,000			3 Unit	95,006,780
X	XX	01	2	09	11	iii	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 Gedung	5,000,000			3 Gedung	77,863,500
1	06	02					PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana		65%	70,000,000	DAU		65%	502,500,000
1	06	02	2	01		2a	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan keluarga fakir miskin lainnya yang meningkat kualitas		45%	25,000,000			45%	300,000,000

X	XX	01	2	01	01	i	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								4 Kali	37,268,000
1	06	02	2	01	01	i	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 KK	25,000,000						150 KK	300,000,000
1	06	02	2	01	02	ii	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota									
1	06	02	2	03		2b	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat potensi sumber kesejahteraan sosial	80%	45,000,000						80%	202,500,000
1	06	02	2	03	01	i	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	205 Orang	45,000,000							-
								Jumlah Kasie Kesos dan PSM mendapat Bimbingan peningkatan kapasitas								224	27,500,000
								Jumlah Penyelenggaraan Evaluasi Kinerja Kasie Kesos dan PSM								1 Kegiatan	27,500,000
								Jumlah kegiatan Bimbingan sosial bagi penerima bantuan sosial dan bantuan hibah								1 Kegiatan	27,500,000
1	06	02	2	03	02	ii	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) mendapat insentif (19 Or x 12 Bln)									-
								Jumlah Keluarga Rawan Sosial Ekonomi Daerah Perdesaan dan Perkotaan mendapat bantuan sosial								60 KK	120,000,000

X	XX	01	2	01	01	i	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								4 Kali	37,268,000
1	06	03					PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase korban tindak kekerasan warga migran tertangani		100%	5,800,000	DAU				100%	13,310,000
1	06	03	2	01		3a	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk			5,800,000						13,310,000
1	06	03	2	01	01	i	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota		5 Orang	5,800,000						
								Jumlah korban tindak kekerasan warga migran mendapat bantuan sosial								5 Orang	13,310,000
1	06	04					PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial		100%	135,000,000	DAU				100%	666,480,000
1	06	04	2	1		4a	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di		40%	135,000,000					40%	560,000,000
1	06	04	2	1	01	i	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		150 Orang	30,000,000					330 Orang	247,500,000

X	XX	01	2	01	01	i	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									4 Kali	37,268,000
1	06	04	2	1	03	ii	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota		300 Orang	25,000,000						25 Orang	150,000,000
1	06	04	2	1	03	ii	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota		20 Orang	30,000,000						25 Orang	162,500,000
1	06	04	2	1	04	iii	Pemberian bimbingan sosial kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta		250 Orang	50,000,000							
1	06	04	2	02		4b	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti		85%	-						85%	106,480,000
1	06	04	2	02	03	i	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota									20 Orang	39,930,000
1	06	04	2	02	04	ii	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota									20 Orang	13,310,000
1	06	04	2	02	05	iii	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota									20 Orang	39,930,000

X	XX	01	2	01	01	i	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								4 Kali	37,268,000					
1	06	05	2	02	02	ii	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota								205 Desa	286,000,000					
1	06	05	2	02	04	iii	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota								4 Kegiatan	22,000,000					
								Jumlah keluarga fakir miskin mendapat stimulan KUBE Penumbuhan									250 KK	500,000,000				
								Jumlah keluarga fakir miskin menerima bantuan UEP-ekonomi kreatif									250 KK	500,000,000				
1	06	06				PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase keluarga korban bencana mendapat bantuan sosial									100%	95,000,000	DAU		100%	309,100,000
1	06	06	2	01		6a	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat									100%	95,000,000			100%	254,100,000
1	06	06	2	01	01	i	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota								3000 Paket	80,000,000				3500	105,600,000
1	06	06	2	01	02	ii	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan								100 Orang	15,000,000				300 Paket	49,500,000

X	XX	01	2	01	01	i	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									4 Kali	37,268,000	
1	06	06	2	01	02	iii	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota										300 Paket	49,500,000
1	06	06	2	01	02	iv	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota										300 Paket	49,500,000
1	06	06	2	03		6b	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase desa yang menyelenggarakan kesiapsiagaan tanggap darurat bencana										100%	55,000,000
						i	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan										1 Kegiatan	22,000,000
1	06	06	2	03	02	ii	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan										2 Kali	33,000,000
1	06	07					PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan pengelolaan Taman Makam Pahlawan										100%	26,400,000
1	06	07	2	02		7a	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah taman makam pahlawan tertangani										1 TMP	26,400,000
1	06	07	2	02	01	i	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota										1 TMP	6,600,000

X	XX	01	2	01	01	i	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				-			4 Kali	37,268,000				
								Kegiatan tali asih veteran dan warakawuri pada Hari Pahlawan				-			1 Kegiatan	19,800,000				
J U M L A H																	4,259,743,399			8,288,118,692

200103750

26701205

173,402,545

79,325,000

